

Pemkot Bandung Gelar Pelayanan Vaksinasi Rabies Gratis

KOTA BANDUNG (IM)- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat menggelar pelayanan vaksinasi rabies gratis untuk memperingati Hari Rabies Sedunia. Pelayanan vaksinasi rabies untuk hewan diadakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung pada Minggu (8/10). "DKPP sudah memberikan 400 vaksin lebih," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar.

Selain menyediakan pelayanan vaksinasi rabies, ia menyampaikan, dinas memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan sterilisasi kucing. "Kita memberikan sterilisasi bagi kucing, yang diberikan secara gratis. Untuk kuotanya hari ini sebanyak 20 hewan," katanya.

Gin Gin menyampaikan bahwa peringatan Hari Rabies Sedunia tahun ini mencakup kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi rabies pada hewan peliharaan.

"Bandung kota besar serta pemelihara hewannya juga cukup banyak, maka kewaspadaan harus ditingkat-

kan, salah satunya dengan pemberian vaksin rabies," kata dia.

Dia mengatakan bahwa wilayah Kota Bandung sudah bebas dari penyakit rabies dan pemerintah berusaha mempertahankan status itu dengan dukungan dari masyarakat.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rasmawan juga mengemukakan pentingnya peningkatan penyuluhan mengenai upaya pencegahan penyakit rabies, utamanya pada pemilik hewan peliharaan.

Rabies termasuk zoonosis, penyakit hewan yang dapat menular ke manusia. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus rabies ini bisa menular melalui gigitan, jilatan, atau cakaran hewan seperti anjing, kucing, monyet, dan kera.

Guna mencegah penularan penyakit rabies atau penyakit anjing gila, vaksinasi rutin harus dilakukan pada hewan peliharaan yang bisa menularkan virus rabies. Vaksinasi rabies juga diperlukan oleh orang-orang yang berisiko tertular virus rabies. ● pra

Pilkades Desa Kembangan Demak Ricuh, Pendukung Saling Lempar Batu

DEMAK (IM)- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Demak sempat terjadi keributan. Pendukung antara dua belah pihak saling lempar batu.

Kapolsek Bonang, AKP Margono, membenarkan kejadian tersebut. Keributan tersebut terjadi sekitar 08.50 WIB. "Pengamanan sudah kita laksanakan di Desa Kembangan sudah sesuai Protap, tapi tadi sempat terjadi gesekan karena pendukung nomor satu dan nomor," kata Margono di Tempat Pemungutan Suara di Desa Kembangan, Minggu (8/10).

Menurut Margono, keributan disebabkan karena para pendukung mengenaikan atribut. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk tidak mengenakan atribut pendukung calon.

"Terjadi gesekan karena pendukung nomor satu dan nomor dua tetap menggunakan atribut yang sudah kita sepakati untuk tidak dilaksanakan. Tentunya mereka menunjukkan identitas, menyanyikan yel yel sehingga terjadi gesekan," kata dia.

Ia menuturkan bahwa keributan tersebut dengan aksi lemparan batu. Sementara satu korban kepalanya lecet akibat lemparan batu tersebut. "Jotos-jotosan tidak ada, tapi ada lem-

paran batu karena memang di lahan tempat pilkades ini baru, banyak batu dibawa, itu yang dilempar sama masyarakat," terangnya.

"Korban ada, jadi mungkin kena batu. Satu orang, kena batu lecet. Batu yang dilempar lempar ke atas itu mengenai kepala, kepalanya lecet," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peristiwa tersebut hanya terjadi sebentar. Kemudian kondisi kembali normal.

"Kejadian itu hanya sebentar kurang lebih hanya beberapa menit. Setelah itu langsung kami laksanakan tindakan dan kembali kondusif, pelaksanaan saat ini kembali menjadi normal," ujarnya. "Pidananya baru kita laksanakan penyelidikan," imbuhnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pilkades Demak, Muzani Ali Shodikin, mengatakan bahwa di Desa Kembangan terdapat 2.812 daftar pemilih tetap. Sementara dua calon kades bernama Suhardi dan M.Shodiq Almubarak. "DPT kita ada 2812, kita bagi satu TPS, satu TPS kira-kira 590-an," terang Muzani.

Seperti diketahui bahwa Pilkades serentak gelombang II terlaksana di 54 desa di Kabupaten Demak. Sebanyak 131 calon kades mengikuti kontestasi Pilkades tersebut. ● pra

Pemkab Bogor Bangun Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Leuwiliang



CIBINONG (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menegaskan tengah mempersiapkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi para pedagang korban kebakaran Pasar Leuwiliang Kabupaten Bogor yang terjadi beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Burhanudin usai Rapat Pembahasan Penanganan Pasca kebakaran Pasar Leuwiliang, di Ruang Rapat I Setda, Jumat (6/10).

Menurutnya, rapat khusus baru saja dilakukan untuk persiapan pembangunan TPS, persiapannya harus lengkap mulai dari pembuatan timeline, penyusunan SK, pernyataan bencana musibah kebakaran, proses inventarisasi pedagang, biaya hingga pembangunan TPS-nya.

"TPS harus dibangun kalau bisa satu bulan ke-

pan sudah jadi. Pembangunannya juga harus melibatkan tim ahli agar pemulihan pasca kebakaran Pasar Leuwiliang ini bisa berjalan dengan optimal," tegas Sekda Burhanudin.

Di tempat yang sama, Dirut PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan menerangkan, saat ini pemulihan pasca kebakaran Pasar Leuwiliang fokus pada pembangunan TPS bagi para pedagang agar mereka bisa tetap berjualan. Dari total 1.644 kios, los dan auting yang sudah terverifikasi ada sekitar 1.033 yang akan dibangunkan TPS.

"Untuk lokasi TPS hasil kesepakatan bersama dengan para pedagang yakni di lingkaran area pasar dalam, mohon doanya mudah-mudahan TPS ini cepat selesai sehingga pedagang bisa kembali berdagang," tukasnya. ● gio

8 | Nusantara



PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD DI BANTEN

Sejumlah warga mengarak panjang (aneka barang sedekah) saat acara perayaan Maulid Nabi Muhammad di Kampung Soyog Kota Serang, Banten, Minggu (8/10). Perayaan Maulid Nabi di Banten ditandai dengan pengumpulan dan pembagian sedekah untuk warga kurang mampu.

Iwan Setiawan Akan Melakukan Rotasi di Sejumlah Jabatan yang Kosong

Kami ingin menugaskan pejabat sesuai keahliannya, karenanya, sejumlah mantan pejabat DPUPR yang sempat pindah ke pemerintah kecamatan, akan kami tarik lagi ke DPUPR, Unit Pengadaan Barang Jasa dan Dinas Pendidikan, kata Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

CIBINONG (IM)- Usai melantik 86 pejabat eselon 3 dan 4, Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan akan melakukan rotasi kembali sejumlah jabatan yang kosong. Dari 86 pejabat yang dilan-

tik Iwan Setiawan, 5 orang di antaranya mengisi posisi camat yang kosong di Kabupaten Bogor yaitu Camat Ciseeng, Camat Klapanunggal, Camat Gunung Putri, Camat Leuwiliang, dan Camat Cijeruk.

"Pasca hari ini, open bidding pun terus kami lakukan agar para pejabat mengisi jabatan yang kosong ataupun perlu penyegaran," kata Iwan Setiawan di Bogor kepada wartawan, Minggu (8/10).

Selain mengharapkan hal yang sama kepada Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang baru dilantik yaitu Dede Armansyah.

"Dede Armansyah kan berpengalaman di lapangan,

hingga kami harapkan pengawalan program Samsisade, alokasi dana desa dan dana desa berjalan baik dan lancar, karena sebelumnya ia sukses membangun hunian tetap (Huntap) di beberapa kecamatan yang terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu," harap Iwan Setiawan.

Selain itu, demi percepatan program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi dan lainnya. Politisi Partai Gerindra ini pun mengembalikan sejumlah mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang sempat bertugas di pemerin-

ting kecamatan. "Kami ingin menugaskan pejabat sesuai keahliannya, sejumlah mantan pejabat DPUPR yang sempat pindah ke pemerintah kecamatan, kami tarik lagi ke DPUPR, Unit Pengadaan Barang Jasa dan Dinas Pendidikan," tukasnya.

Bupati Bogor, Iwan Setiawan juga mengingatkan di tahun politik ini, ia memerintahkan ASN tetap jaga netralitas, jaga persatuan dan kesatuan, serta fokus bekerja.

"Seluruh pejabat agar bekerja cerdas, cepat, cermat, sesuai dengan peraturan, ketentuan dan kode etik yang berlaku," tukas Iwan. ● gio

Bupati Iwan Setiawan, Ingin ASN Akselerasi Target Pembangunan

BOGOR (IM)- Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor agar lebih mengakselerasi capaian target pembangunan di akhir periode RPJMD tahun 2018-2023.

Ingin capaian akselerasi target Iwan Setiawan, seiring jabatan dirinya akan berakhir pada medio Desember 2023 mendatang.

Karena itu wajar jika dia mengingatkan jajarannya, pada saat momen pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas pemkab Bogor, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat kemarin (6/10).

Para pejabat yang dilantik sebanyak 86 orang ASN diambil dan dilantik sebagai Pejabat Administrator

dan Pejabat Pengawas di lingkup Pemkab Bogor.

Hadir pada kegiatan tersebut perwakilan Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, beserta jajaran kepala perangkat daerah.

Iwan Setiawan mengungkapkan, bagi para pejabat yang baru dilantik, segera menyesuaikan, pahami tugas masing-masing dan langsung bekerja efektif agar pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan lancar.

"Ini adalah amanat yang sederhana namun harus diterjemahkan lebih luas, di akhir periode RPJMD tahun 2018-2023 kita harus mengakselerasi capaian target pembangunan Pemkab Bogor untuk masyarakat," tandas Iwan Setiawan.

Iwan menambahkan, pelantikan akan dilakukan secara bertahap, proses

open bidding pun masih berjalan. Intinya ini untuk mengisi kekosongan dan semoga setelah terisi jalannya birokrasi bisa lebih baik. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ini kan bekerja dengan data.

"Saya berharap, dengan menempatkan orang-orang yang tepat, yang memang ahli di bidangnya, bisa meningkatkan pelayanan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bogor," tambah Iwan.

Iwan Setiawan juga mengingatkan di tahun politik ini, ia memerintahkan ASN tetap menjaga netralitas, jaga persatuan dan kesatuan, serta fokus bekerja cerdas, cepat, cermat, sesuai dengan peraturan, ketentuan dan kode etik yang berlaku. ● gio



Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas pemkab Bogor, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong.

Pemkot Rancang Perwal Tentang Komite Sekolah

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah merancang Peraturan Wali Kota (Perwali) tahun 2023 tentang Komite Sekolah.

Tahapannya Disdik telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Optimalisasi Pengkajian Peraturan Wali Kota Bogor Tahun 2023 Tentang Komite Sekolah'. FGD dilakukan sebagai upaya untuk terus bergerak membangun dan memperbaiki sistem pendidikan yang carut marut.

FGD akhir pekan kemarin dihadiri Wali Kota Bogor, Bima Arya, perwakilan Forkopimda, para komite sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) juga peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pengawas sekolah, aktivis mahasiswa, LBH, kepala sekolah, guru serta dekan dari universitas.

"Bahwa dalam membangun sistem pendidikan yang perlu dimiliki adalah kepastian, hati nurani dan komunikasi yang efektif dengan semua pihak. FGD membuka mata semua bahwa bukan hanya tentang Perwali, namun lebih dari itu adalah sebagai upaya untuk terus bergerak membangun dan memperbaiki sistem pendidikan yang carut marut," ungkap Wali Kota Bogor, Bima Arya pada Minggu (8/10).

"Dan Insya Allah ikhtiar ini bukan hanya memberikan dampak di Kota Bogor, tapi bisa menjadi model di tempat lain," tambah Bima.

Bima memaparkan, ada berbagai masukan yang disampaikan dalam FGD. Mulai dari aturan yang ada di Permendikbud Ristek, kemudian tupoksi, apa dan yang tidak boleh dilakukan sesuai aturan, alokasi anggaran, sumbangan, dilibatkannya

mahasiswa, komite, akademisi, dalam penyusunan program sekolah serta penganggaran, keterbukaan laporan dan transparansi penggunaan anggaran, komite harus belajar memahami aturan yang ada dan sebagainya. "Tentunya Masukan-masukan yang disampaikan oleh para peserta ini, agar semuanya didengar dan dikaji lebih dalam serta memasukkan beberapa penguatan dari aturan Permen-dikbud Ristek. Saya tipe coba ke depan kami akan buat pendampingan dengan ICW, mahasiswa, dosen, kelompok kajian, study dan sebagainya untuk terus mengawal program komite," papar Bima.

Bima menerangkan, dengan begitu, sekolah bisa memiliki konsep yang jelas untuk pengembangan siswa, baik dari sisi ekstra kulikuler, pengembangan minat, pembinaan karakter dan hal hal apa saja yang perlu menjadi prioritas, baik dari sisi infrastruktur ataupun pengembangan siswa.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto menyampaikan, komite memiliki peran penting dalam membantu memajukan dan mengembangkan sekolah. Namun, dirinya memahami bahwa tidak seluruh komite paham tentang wilayah yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan sehingga dipandang sebagai wilayah abu-abu.

"Sehingga dengan adanya FGD perwali ini pihaknya akan mendengarkan masukan dan saran serta diskusi dari berbagai pihak dari sisi legalitas aturan dan teknis lainnya terkait pembiayaan. Dengan adanya Perwali ini kami bisa mendapatkan aturan yang lebih rinci terkait yang boleh dan yang tidak berkaitan dengan sumbangan ataupun pungutan," terangnya. ● gio